

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 31 Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan	
2.3 Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	
2.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
2.5 Kebijakan Strategis Penghargaan	
BAB III TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021	
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat di atasnya	
4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya	
BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan TA 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan TA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun..... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2021 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026, yaitu pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RENSTRA.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IKU Eselon II)
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah layanan yang diberikan kepada PPKS dibagi jumlah PPKS	persentase	53 %	53 %	Persentase layanan kesejahteraan sosial
2.	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	Jumlah graduasi kpm PKH dibagi Jumlah kpm PKH	persentase	0.3 %	0.3 %	Presentase graduasi kpm PKH
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	Komposit keterlibatan perempuan di parlemen, pekerja perempuan dan sumbangan pendapatan	persen	55.31	56.93	Indeks Pemberdayaan Gender dirilis oleh BPK dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	prediket	Inisiator	Inisiator	Capaian prediket Kabupaten Layak Anak

4.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	persentase	0.3 %	0.3 %	212.783.950	207.113.850	Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	1. Meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial secara berkala.	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			n Bupati Sumatera Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2021;										
1				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah TKSK yang dibina	orang	15	15	126,168,930	122,734,750			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS yang dibina	organisasi	13	13	30,057,108	28,044,300			
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	persentase	53 %	53 %					
3				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan alata bantu disabilitas	unit	16	16	35,528,080	35,526,530			
4				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah pelayanan kansas orang terlantar	orang	15	15	112,476,977	112,449,577			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Keluarga									
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	persentase	53 %	53 %					
5				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	persen	30	30	307,736,530	75,067,200			
				Program Penanganan Bencana	Layanan korban bencana	bulan	12	12	82,871,730	79,782,050			
6				Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan bencana alam dan bencana sosial	bulan	12	12	82,871,730	79,782,050			
				Program Pengelolaan Taman Makam	Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	lokasi	2	2	20,512,692	19,383,825			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pahlawan									
7				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	lokasi	2	2	20,512,692	19,383,825			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	persen	55.31	56,93	62,653,440	61,462,200			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2021;										
10				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	Kegiatan opd	30 30	30 30	4,706,000	4,636,000			
11				Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	organisasi	2	2	57,947,440	56,826,200			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Perlindungan Perempuan	Prediket Kabupaten Layak Anak	prediket	inisiator	inisiator	161,956,000	21,033,000			
12				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	50	50	31,870,000	19,586,750			
13				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Layanan kasus yang difasilitasi	bulan	12	12	130,086,000	1,446,250			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(P2TP2A)									
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen profil gender	dokumen	2	2	22,455,230	22,454,300			
14.				Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen profil gender	dokumen	2	2	22,455,230	22,454,300			
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta advokasi PHA	orang	50	50	1,164,000	1,159,050			
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah peserta advokasi PHA	orang	50	50	1,164,000	1,159,050			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota									
				Program Perlindungan Khusus Anak									
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	orang	50	50	31,506,140	31,500,490			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah peserta koordinasi dan	orang	50	50	21,660,000	18,988,050			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak								
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /	Layanan kasus kekerasan terhadap anak	bulan	12	12	368.294,000	33,816,750			

4.4 Kebijakan Strategis

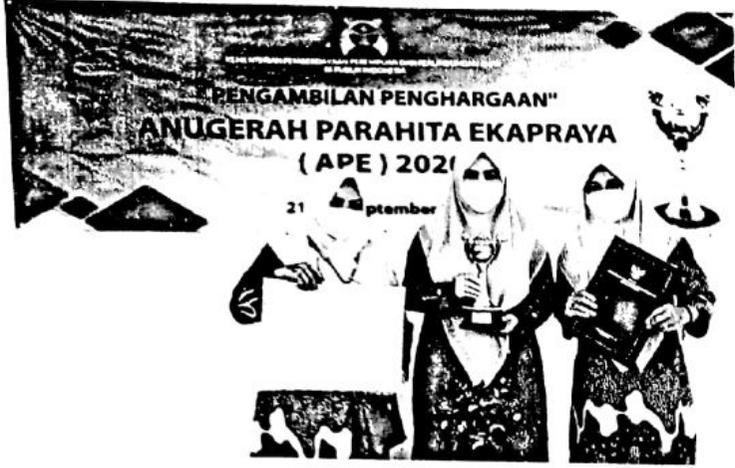
Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin		Rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
2	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Rendahnya pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan pada generasi muda
3	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang		Rendahnya pemahaman pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Daerah
4	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.		Cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Anugerah Parahita Ekapraya	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jakarta, 21 September 2021	

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
2	3	4
NIHIL		

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ TA 2021) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.